PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO**

UNIT KERJA : **SEKRETARIAT DAERAH**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ISKANDAR DATAU**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH**
3. NHK : **492931**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.083.350.000**

1. Tanah Seluas 528 m2 di KAB / KOTA POHUWATO, HASIL SENDIRI Rp. 26.400.000
2. Tanah Seluas 271 m2 di KAB / KOTA POHUWATO, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
3. Tanah Seluas 369 m2 di KAB / KOTA POHUWATO, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 214 m2/180 m2 di KAB / KOTA POHUWATO, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 239 m2 di KAB / KOTA POHUWATO, HASIL SENDIRI Rp. 11.950.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 690 m2/252 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
7. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA POHUWATO, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
8. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA POHUWATO, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
9. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA POHUWATO, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 432 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. ----**

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 13.750.000**

D.	SURAT BERHARGA	Rp.	----
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	37.926.671
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	----
	Sub Total	Rp.	1.135.026.671
III.	HUTANG	Rp.	331.886.991
IV.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	803.139.680

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.